

**EVALUASI RETRIBUSI PASAR TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI  
SURAKARTA**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**AVINGRUM SETYANINGSIH**

**B 200 050 130**

**FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap pemerintah daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Dengan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolok ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap PAD.

Dari penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan PAD dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian ijin khusus yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemda kepada pribadi/badan, diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

Beberapa faktor yang menyebabkan sektor retribusi daerah lebih potensial sebagai sumber keuangan daerah daripada sumber-sumber yang lainnya, antara lain:

1. Retribusi daerah dipungut atas balas jasa sehingga pembayarannya dapat dilakukan berulang kali. Siapa yang menikmati jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dapat dikenakan retribusi. Faktor perbedaan antara pungutan retribusi dengan sumber-sumber pendapatan yang lain adalah ada tidaknya jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah.
2. Pelaksanaan pemungutan retribusi dapat dilakukan di luar waktu yang telah ditentukan oleh petugas perundang-undangan selama pemerintah daerah dapat menyediakan jasa dengan persetujuan pemerintah pusat.

3. Sektor retribusi terkait erat oleh tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat di suatu daerah. Artinya, semakin maju dan berkembang tingkat sosial ekonomi masyarakat, maka semakin besar potensi retribusi yang bisa dipungut.

Retribusi merupakan salah satu PAD bagi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu cara untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pendapatan dari retribusi yang dalam hal ini adalah semua retribusi yang dapat dipungut dari pasar, yaitu retribusi pasar.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemkot Surakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat Surakarta.

Dari berbagai macam retribusi yang dipungut oleh Pemkot Surakarta, yang potensial adalah retribusi pasar, karena mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan daerah dibandingkan dengan retribusi yang lain. Hal ini dikarenakan Kota Surakarta setidaknya mengelola 37 pasar tradisional dan dari kesemua pasar tersebut ditarik retribusi pasar. Dengan meningkatnya kehidupan perekonomian Kota Surakarta, maka akan memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat Surakarta. Perkembangan kehidupan perekonomian yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

Pasar adalah salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Dengan adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Surakarta. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemkot Surakarta untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Usaha pengembangan penerimaan retribusi pasar pada tiap tahunnya mengalami kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut di antaranya menyangkut perilaku wajib retribusi, para wajib retribusi pasar seringkali melakukan penunggakan pembayaran retribusi dengan berbagai alasan. Dari penunggakan inilah kemudian penerimaan yang didapatkan tidak bisa optimal. Permasalahan dari faktor eksternal tersebut tidak berdiri sendiri, karena masih ada permasalahan faktor lingkungan internal Dinas Pengelolaan Pasar sendiri yang kurang menguntungkan, yaitu penerapan sanksi berdasarkan Perda nomor 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar yang hanya sebesar 2% dari total retribusi yang harus dibayarkan oleh wajib retribusi dikesampingkan oleh wajib retribusi itu sendiri.

Permasalahan itulah yang kemudian mengakibatkan penunggakan pembayaran retribusi pasar yang akan berimbas pada menurunnya total penerimaan retribusi pasar tiap tahunnya. Oleh karena itu, maka Dinas Pengelolaan Pasar harus benar-benar fokus pada strategi-strategi yang akan diambil dan dilaksanakan. Dari latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “EVALUASI RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI SURAKARTA.”

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, maka Pemkot yang dalam hal ini adalah Surakarta harus mampu menggali semua sumber PADnya. Sumber-sumber PAD itu sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, otonomi yang seluas-luasnya mengakibatkan pasar bukan hanya sebagai unit pelayanan saja, tetapi juga merupakan unit usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Surakarta?
2. Bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Surakarta?
3. Apakah pemungutan retribusi pasar di Surakarta selama ini sudah efektif?

## **C. Pembatasan Masalah**

Agar pembahasan penelitian dapat terfokus, tidak meluas, dan dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai, maka batasan dalam penelitian mengenai retribusi pasar ini adalah:

1. Retribusi pasar dan retribusi sampah

Mencakup pengertian pasar dan sampah, retribusi pasar dan sampah, obyek dan subyek retribusi pasar dan sampah, serta struktur dan besarnya tarif retribusi pasar yang berlaku di Surakarta.

2. Masalah target dan realisasi PAD Kota Surakarta khususnya untuk retribusi pasar, dimulai pada tahun anggaran 2003 sampai dengan 2007.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap PAD di Surakarta.
2. Mengetahui bagaimana tingkat pertumbuhan retribusi pasar di Surakarta.
3. Mengetahui apakah pemungutan retribusi pasar di Surakarta selama lima tahun anggaran sudah efektif.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi Pemkot Surakarta, dapat digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi besarnya sumber retribusi pasar kota Surakarta agar dapat memenuhi target yang ditetapkan.
2. Bagi penulis, dapat menambah wawasan tentang retribusi pasar dan mengetahui target yang ditetapkan, serta diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemkot Surakarta untuk mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan PAD guna membiayai pembangunan daerah, khususnya penerimaan yang berasal dari retribusi pasar.
3. Bagi pembaca, dapat digunakan sebagai acuan atau bahan referensi bagi peneliti selanjutnya, serta menambah pengetahuan dalam meningkatkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh sebelumnya.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah mendapatkan gambaran tentang pembahasan, maka ringkasan sistematika penelitian adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.**

Dalam bab ini diuraikan tentang permasalahan secara umum yang meliputi: latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan

**BAB II LANDASAN TEORI.**

Dalam bab ini diuraikan tentang teori-teori yang akan mendukung dalam penelitian yang meliputi pengertian otonomi daerah, pendapatan asli daerah (PAD), retribusi daerah, retribusi pasar, dan kontribusi efektifitas.

**BAB III METODE PENELITIAN.**

Membahas tentang jenis penelitian, data dan sumber data, serta metode analisis data.

**BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.**

Berisi gambaran umum dari obyek penelitian, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis, dan pembahasan.

**BAB V PENUTUP.**

Bab terakhir berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang diperoleh dari pembahasan dan saran-saran yang perlu diajukan.